Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 6, No. 1 (2022); pp. 119-135

PERANAN WISATA SETIGI (SELO TIRTO GIRI) DALAM PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA SEKAPUK KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

[*1] Ika Devy Pramudiana , [2]Zuhdi Ahmadi Rafiatma, [3]Sri Kamariyah, [4]Nihayatus Sholichah
[1 2 3 4] Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
*Ika.Devy@unitomo.ac.id

Artikel History
Submit: 22 Februari 2022
Review: 26 April 2022
Revised: 19 Mei 2022
Accepted: 28 Juni 2022

Abstract: Tourism is the most important sector in economic development and development. Tourism in Indonesia as a supporting factor for the economy has bright prospects. One of the local governments that is quite successful in exploring and developing the tourism potential of this new village is Gresik Regency through Sekapuk Village which has Setigi tourism. Setigi tourism is part of the policy product carried out by the Sekapuk Village government, the mechanism for establishing Setigi tourism is part of the results of the Sekapuk Village deliberations. In recent years, Gresik Regency has tended to focus on tourism development in its area as an alternative to the mining industry. The purpose of this research is to find out the role of Setigi tourism in increasing village original income in Sekapuk village, Panceng district, Gresik Regency, this needs to be done because the community is a very important element to support the successful development of an area. This study used qualitative research methods. The results of this study are showing the success of Setigi tourism in increasing Regional Original Income and being able to bring in new economic sources other than being farm laborers. It is known that there has been an increase in the APBdes in Sekapuk Village in the last 4 years, namely an increase in PADes from 2019 to 2021, an increase of 100% over 2,380,014,655 in 2019 to 9,590,701,000,00 in 2021, while there is an increase in the aspect of MSME movement, one of which is the involvement of MSME residents who always sell in the area. tourism, as well as employing local residents in tourism Setigi.

Keywords: Tourism, Regional Original Income, Village Owned Enterprises, Sekapuk Village.

Pendahuluan

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, maka guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dipandang sebagai menjadi sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan

dalam proses pembangunan di Indonesia. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata.

Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu. Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Bisa dibilang, angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019.

Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp20,7 miliar. Parahnya, penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67% (**https://kemenparekraf.go.id/)**

Gambar 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2017-2021

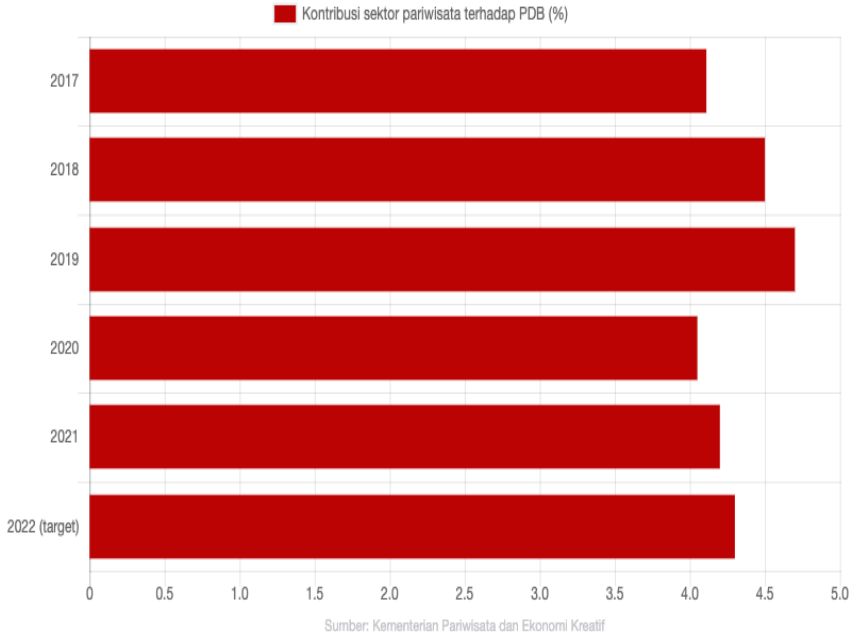

Pandemi Covid-19 membuat kontribusi pariwisata terhadap PDB anjlok. Turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) karena pandemi Covid-19 praktis membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dan devisa negara merosot. Pada 2020 misalnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 4,05%, setelah di tahun sebelumnya mencapai 4,7%.

Sedangkan untuk devisa sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan akan sebesar US$0,36 miliar saja di tahun 2021. Angka itu jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang senilai US$3,3 miliar. Adapun pada tahun 2019, devisa sektor pariwisata mampu mencapai US$16,9 miliar. (*Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB*,2017-2021)

Pariwisata merupakan sektor paling penting dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah terhadap pariwisata dalam menunjang keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan pariwisata sehingga dapat memberikan pemasukan yang besar terhadap pendapatan daerah. Pariwisata diharapakan menjadi sektor penting dalam meningkatakan perekonomian daerah. Sejak era otonomi daerah, daerah diberi kewenangan dalam merencanakan, mengembangakan, dan mengelola pariwisata. (Gustina and Mussadun, 2018)

Implementasi otonomi daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi pemerintan dilevel daerah untuk mengurus, mengelola, dan mengatur sebagian besar kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya lebih leuasa. Hal tersebut tegas dijelaskan dalam (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2014)yang menjelaskan bahwa sebagai daerah otonom, kabupaten/kota mempunyai hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota secara prinsip dalam rangka pembangunan diperluas kepada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu desa.

Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam (*Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014), dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan Desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan Desa.

Dalam hal pengelolaan Pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternative pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata menurut (Edwin, 2015) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Indonesia sangat banyak destinasi wisatanya, salah satu penelitian oleh Defiana Indah Safitri yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Magelang, menyebutkan bahwa strategi pembangunan pariwisata daerah dengan cara meningkatkan kemitraan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, serta menyusun manajerial yang terpadu dan profesional di setiap objek wisata dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota Magelang. Strategi–strategi tersebut dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Magelang

Dari penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan strategi-strategi dari Pemerintahan. Selain kota Magelang, Pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata desa baru-baru ini adalah Kabupaten Gresik yang semula kabupaten industri karena terdapat beberapa industri besar yang terkenal berada di daerah ini, seperti industri semen, petrokimia, maupun industry lainnya. Beberapa tahun ini Kabupaten Gresik memang cenderung memfokuskan pengembangan pariwisata di wilayahnya sebagai alternatif dari industri pertambangan (Asmoro and Aziz, 2020). Salah satu desa yang ditetapkan menjadi desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Gresik adalah Desa Sekapuk yang mempunyai wisata Setigi. Pariwisata Setigi bagian dari produk kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sekapuk, mekanisme pembentukan wisata Setigi adalah bagian dari hasil musyawarah Desa Sekapuk, dulu lahan yang dipakai wisata Setigi adalah bagian dari tempat pembuangan sampah, karena lahan yang mangkrak beberapa tahun, bekas dari tambang galian C yang lokasinya ada digeografis Desa Sekapuk. Dari bekas tambang hingga menjadi sampah yang menumpuk bertahun-tahun, mampu disulap menjadi sebuah tempat wisata yang ramah lingkungan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bahkan desa ini pernah menyabet juara 1 desa brilian se-Indonesia dalam Program Inkubasi BRIncubator Goes to Desa Brilian. Selain itu Sebelum dipimpin oleh Bapak Abdul Halim pada akhir tahun 2017 lalu, Indeks Desa Mandiri (IDM) yang dimiliki oleh Desa Sekapuk masih menunjukkan angka dibawah rata-rata (desa tertinggal). Mengingat sebagian besar masyarakat Desa Sekapuk sangat tergantung dari hasil pertanian, maka jika terjadi penuruan harga hasil panen akan menjadi masalah bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Atas dasar hal tersebut, dengan adanya Obyek Wisata Setigi dapat membantu menambah penghasilan penduduk sekitar dengan bekerja di obyek wisata ataupun berwirausaha seperti berjualan makanan dan minuman, cinderamata, dan lain sebagainya sehingga IDM Desa Sekapuk sejak tahun 2018 hingga 2019 ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Desa maju.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Kawasan wisata Setigi memerlukan adanya suatu studi untuk mengetahaui "Bagaimana peran wisata Setigi dalam peningkatan Pendapatan asli desa di Desa Sekapuk Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?", hal tersebut perlu dilakukan karena masyarakat merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung keberhasialn pengembangan suatu wilayah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara yang didapat setelah peneliti melakukan *focus group discussion (FGD)* serta *indepth interview* kepada para informan dengan beberapa narasumber yaitu kepala desa, perangkat desa, pengelola wisata Setigi, masyarakat sekitar yang mempunyai usaha di wisata Setigi dan juga pengunjung. Selain wawancara juga terdapat dokumen penelitian yaitu buku, jurnal, laporan desa tentang APBdes, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain untuk melengkapi observasi penelitian.

Dalam penelita kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Creswell, 2013) Pemilihan pendekatan kualitatif didasari atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap apa ya ng tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Dalam penelitian ini, terungkap bagaimana peran wisata SETIGI dalam peningkatan Pendapatan asli desa. Dengan data tersebut peneliti memungkinkan untuk menyelidiki dan memaknainya secara utuh sehingga mampu memberikan penjelasan secara terinci tentang fenomena yang diteliti secara keseluruhan (Moleong, 2000).

Hasil Penelitian

Mengenal Wisata SETIGI

Pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata desa baru-baru ini adalah kabupaten Gresik yang semula lebih identik sebagai kabupaten industri. Kabupaten Gresik merupakan suatu daerah yang berbatasan dengan Surabaya. Gresik sangat terkenal dengan sebutan kota industri di Jawa timur karena terdapat beberapa industri besar yang terkenal berada di daerah ini, seperti industri semen, petrokimia, maupun industri lainnya. Kabupaten Gresik ini tidak hanya memiliki industri atau pabrik yang terkenal, melainkan merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Jawa timur selain kota Batu Malang, Banyuwangi, Surabaya maupun kota lainnya. Objek wisata di kabupaten Gresik memiliki feature yang berbeda-beda. Sebagian tanah di Kabupaten Gresik adalah kapur jadi terdapat beberapa kawasan penambangan kapur, namun bekas dari pertambangan dapat dijadikan sebagai daerah wisata yang mempunyai keunikan tersendiri (Hamidah, 2016).

Salah satu desa yang ditetapkan menjadi desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Gresik adalah Desa Sekapuk yang mempunyai wisata SETIGI. Desa sekapuk merupakan suatu desa yang berada di ujung Barat Kecamatan Ujungpangkah. Secara teritorial, Desa Sekapuk berada di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik. Wisata Bukit Kapur (SETIGI) adalah sebuah lokasi destinasi wisata alam terbaru yang belakangan ini menjadi populer di Kabupaten Gresik. Destinasi wisata baru yang bernama SETIGI kepanjangan dari Selo Tirto Giri, yang artinya selo (goa) tirto (air) dan giri (bukit). Nama tersebut diambil berdasarkan dari latar belakang lokasi wisata yang memang pada zaman dulu terdapat danau dan bangungan sekitar lokasi yang dikelilingi perbukitan batu kapur.

Nama tersebut digagas oleh Kepala Desa Sekapuk saat ini dengan alasan melihat dari latar belakang lokasi wisata. Sudah puluhan tahun lokasi SETIGI dijadikan lokasi penambangan batu kapur oleh masyarakat desa Sekapuk dan sekitarnya hingga saat ini dan lambat laun proses galihan tambang tersebut menyisakan lorong-lorong tebing dan perbukitan yang sangat indah (Jannah, 2019).

SETIGI secara alami memiliki potensi sebagai sebuah daya tarik wisata. Dengan formasi perbukitan kapur unik yang menjulang tinggi, bentukan gua dan cerukan sisa aktivitas penambangan masa lalu menjadikannya begitu artistik dan membuat daya tarik tersendiri. Akhirnya menarik pemerintahan desa untuk menjadikannya sebagai suatu wisata alam, ditambah dengan suasana alami pedesaan dan karakter masyarakat setempat yang ramah. Keseluruhan unsur-unsur tersebut menjadikannya satu kesatuan produk wisata menjanjikan. Terlebih lagi SETIGI terus dikembangkan dengan dibangunnya spot-spot selfie, yang dengan sendirinya mengakomodasi preferensi wisatawan milenial.

SETIGI juga merupakan salah satu daya tarik wisata di Gresik yang diberi lampu hijau untuk beroperasi kembali pada periode PPKM. Bahkan SETIGI juga diikutkan sebagai perwakilan Kabupaten Gresik dalam ajang kompetisi pariwisata tingkat nasional. Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi pihak pengelola. Fakta ini juga bisa dilihat sebagai satu indikasi awal bahwa SETIGI cukup memiliki arti penting bagi masyarakat Gresik, khususnya masyarakat Desa Sekapuk. Namun demikian, tentu diperlukan satu kajian akademis untuk melihat bagaimana sebenarnya pengembangan SETIGI selama ini telah berjalan.

Wisata SETIGI mulai dikunjungi masyarakat sejak 2018 Kemudian Pemerintah Desa meresmikan dan melakukan *grand opening* pada wisata tersebut pada tanggal 01 Januari 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk. Wisata SETIGI ini di bangun karena timbul sebuah masalah, polemik yang timbul selama 13 dekade kepemimpinan sebelum bapak Abdul Halim. Manager wisata tersebut merupakan salah satu bukti dan pelaku sejarah, karena pihak manager dulu pernah menjabat sebagai ketua RT pada tahun 2000-2012. Sumber masalahnya dijadikan tempat pembuangan sampah selama bertahun-tahun pasca tambang dan itu merupakan sebuah polemik bagi RT 05, karena semua sampah dari Desa Sekapuk di buang pada daerah pasca tambang. Saat hujan sampah-sampah tersebut akan mengeluarkan bau busuk, dari situlah muncul ide untuk dijadikan wisata oleh Abdul Halim selaku kepala desa.

Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepala desa terhadap potensi yang ada di Desa Sekapuk ini. Pembangunan ini harus ada *leadership* yang kuat,

apabila kita bergantung dari aspirasi masyarakat tidak akan dibangun. Seperti masyarakat di Desa Sekapuk banyak hampir 60 ribu, apabila kita mencari aspirasi ini tidak akan terlaksana program kerja ini. Jadi kita harus ada konsep yang kita buat, setelah itu melibatkan semua elemen stakeholder yang ada di desa. Untuk konsepnya sendiri sudah dimiliki oleh kepala desa. Jadi masyarakatnya mengikuti apa yang sudah dimiliki oleh kepala desa, sebagai bentuk rasa tanggung jawab masyarakat dengan apa yang sudah dipilih dalam pemilihan kepala desa saat itu.

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat pedesaan, karena kepala desa di berikan hak otonomi untuk mensejahterkan masyarakatnya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan pihak yang mengkomunikasikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik kepala desa dapat berperan sebagai administrator dalam pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan.

Untuk menjalankan peran kepemimpinan, kepala desa memfasilitasi adanya pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan di tanggal 1 yang di hadiri oleh para anggota BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), PEMDES (Pemerintahan Desa), lembaga desa lainya seperti (RT & RW) dan anggota masyarakat lainnya. Untuk rapatnya sendiri dilakukan secara transparan untuk membahas tentang anggaran keuangan, evaluasi, *planing* kedepannya. Perencanaan dan pelaksanaan tempat wisata memang melibatkan semua pihak dari berbagai aspek masyarakat yang ada. Masyarakat merasa pembangunan tempat wisata ini sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Untuk konsep dari wisata SETIGI ini hanya mengikuti konsep dari kepala desa namun untuk pengelolaan wisata tersebut melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai aspek masyarakat yang ada mulai dari RT/RW, BUMDES, dan lembaga desa lainnya.

Pembangunan wisata SETIGI tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Adanya Partisipasi juga dapat membanguan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membantu pembangunan sosial

jangka Panjang yang merupakan modal antara pejabat pemerintah dan warga Negara (Pflughoeft, Benjamin R., 2020).

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada sebuah pembangunan bentuk pelibatannya bisa dalam bentuk pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan gaya kepemimpinan kepala desa yang efektif yang dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta berpatisipasi dalam pembangunan desa (Tumbel, 2018).

Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Partisipasi dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap toleransi yang dikarenakan adanya koordinasi dalam suatu komunitas dalam mengelola sumber daya alam. Melalui adanya partisipasi dari masyarakat maka dapat membangun adanya keguyuban antara sesama (Gurney, 2016).

Menurut Pendapat Hamijoyo dan Iskandar yang dikutip Pasaribu dan Simanjuntak dalam (Huraerah, 2008) sebagaimana dikutip bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sana pertemuan atau rapat.

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.

d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri atau memberikan bantuan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada desa atau anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Partisipasi masyarakat Sekapuk tidak hanya dalam kegiatan ekonomi melainkan juga berpartisipasi dalam pembangunan. Warga sekapuk juga memberikan partisipasinya dengan melakukan gotong royong berasama dari awal dikelolanya bukit kapur bekas galian tambang yang sebelumnya terbengkalai dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Akhirnya warga mengadakan kerja bakti untuk membersihkan tempat tersebut dari timbunan sampah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang kurang aktif dalam berpartisipasi atau tidak mau untuk ikut membantu dalam membersihkan lokasi wisata tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa sekapuk pada saat melakukan wawancara, beliau menjelaskan bahwa ada juga warga yang tidak setuju untuk membangun wisata SETIGI karena mereka menganggap bahwa lokasi wisata tersebut sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah sehingga dianggap bahwa tempat itu merupakan tempat yang memalukan. Meskipun ada penolakan dari beberapa warga terkait adanya pengelolaan wisata SETIGI ini, tetap tidak mempengaruhi warga lainnya untuk tetap berpartisipasi untuk membangun wisata setigi tersebut. Sehingga wisata SETIGI semakin terkenal dan perekonomian desa semakin baik berkat adanya wisata SETIGI. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan menjadi efektif jika pelibatannya tidak hanya sekedar di awal atau di akhir pengembangan pariwisata, melainkan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam bekerjasama dengan perencana untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Peran Wisata Dalam Meningkatkan PAD

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (PM.26/UM.001/MKP/2010). Selain itu pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Pengembangan desa wisata juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan

yang berkelajutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan, diantaranya: 1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, 2) menguntungkan masyarakat setempat melibatkan masyarakat setempat, dan 3) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Hal ini sesuai dengan pengelolaannya wisata Setigi memperkerjakan masyarakat sekitar dengan syarat wajibnya KK dan KTP Desa Sekapuk sehingga dari itu bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Sekapuk dan juga meningkatkan perekonomiannya yang merupakan sebuah peruabahan terencana. Karena dalam pengembangan desa wisata ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya. Namun, masyarakat lokal juga perlu mampu membuka diri terhadap pihak luar atau wisatawan, serta mampu mengembangkan diri dengan potensi yang dimilikinya. Sehingga pengembangan pariwisata sepenuhnya dapat didorong dengan kapasitas kelembagaan masyarakat yang baik dan pengembangan desa wisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa. Dengan demikian, bahwa pengembangan desa wisata adalah salah satu ciri pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa secara keseluruhan perlu menjalin dan mengembangkan kerja sama yang maksimal dalam menggali, merumuskan rencana, dan mengembangkan potensi pembangunan desa dengan strategi yang tepat agar tujuan pengembangan desa dapat tercapai dengan maksimal pula.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat juga diterapkan dalam pengembangan wisata SETIGI seperti adanya stand kulinernya sendiri dikelolah oleh ibu-ibu PKK, sedangkan untuk stand cinderamatnya dikelolah oleh setiap RT yang berada di Desa Sekapuk. Ada beberapa stand yang menjual cinderamata, stand tersebut merupakan penjualan dari beberapa RT di Desa Sekapuk. Dan harga cinderamata dari harga 5.000 rupiah sampai sekitar harga 100.000 rupiah. Seperti yang kami lihat untuk pembeli cinderamata sama seperti tempat wisata pada umumnya, para wisatawan membeli cinderamata yang nantinya akan menjadi oleh-oleh khas wisata SETIGI. Di wisata SETIGI memiliki 3 pramuwisata. Lalu terdapat area kuliner yang menyediakan beberapa stand kuliner yang berbeda, stand kuliner tersebut bukan milik pribadi melainkan milik lembaga dan dikelola oleh pusat pengelola wisata Setigi agar para pengunjung tidak diresahkan dengan harga yang melambung tinggi yang tidak sesuai dengan katalog yang ada.

Selain stand cinderamata dan stand kuliner. Wisata SETIGI juga mempunyai produk 'Dapur Mbok Inggih' yang digawangi PKK Desa Sekapuk. Masyarakat membuat jajanan makanan minuman tradisional. Omzetnya pun luar biasa, dan strategi ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar di tengah pandemi. Hal tersebut bertujuan agar setiap lembaga desa menjadi lembaga yang mandiri dan mendapatkan uang tambahan agar tidak bergantung dengan uang dari iuran masyarakat. Maka dapat diartikan Pengembangan wisata Setigi ini merupakan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Made yang mengatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat lokal merupkan pelaku utama karena paling mengetahui potensi wilayah atau karakter dan kempuan unsur- unsur yang ada dalam desa termasuk *indigenous knowledge* yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang direncakan sesuai dengan keinginan masyarakat lokal, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembagan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada lokal tersebut merupakan unsur penggerak utama dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Keterlibatan Masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan desa wisata menjadi penting, karena alasan sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan potensi desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata ditujukan agar masyarakat lokal dapat memiliki rasa kepemilikan terhadap potensi desa wisata yang dikembangakan sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikutserta dalam pengembangan desa wisata.
3. Pengembangan desa wisata yang dilakukan secara bersama-sama akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kelembagaan yang kuat (Amerta, 2019).

Sementara itu Ketua BUMDES Sekapuk, Asjudi, menambahkan, wisata SETIGI merupakan satu dari lima unit usaha yang dikembangkan oleh desanya. Empat unit usaha lain, Perusahaan Air Masyarakat (PAM), usaha multi jasa yang melayani simpan pinjam masyarakat, pengolahan sampah masyarakat, serta pengolahan tambang. Tidak Hanya itu, pihak pengelola SETIGI Gresik juga mengajak masyarakat untuk membuat jajanan tradisional yang dikemas dengan menarik. Lalu, setiap pengunjung atau

wisatawan yang datang diwajibkan untuk membeli satu produk yang orisinal dibuat oleh warga Desa Sekapuk.

Maka dengan adanya wisata Setigi bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan peluang pekerjaan serta ekonomi masyarakatnya terangkat, apalagi aspek UMKM-nya dengan adanya keberadaan wisata SETIGI ini. Dari data di atas, maka keberadaan Setigi ini bagaian dari peningkatan ekonomi desa serta pendapatan asli desa seperti data pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. APBdes Desa Sekapuk 4 tahun terakhir

No	APBdes	Tahun
1	2,380,014,655	2019
2	3,202,614,766,89	2020
3	5,831,247,000,00	2021
4	9,590,701,000,00	2022

Sumber: Desa Sekapuk tahun 2022

Dari data di atas menunjukan Keberadaan wisata Desa Setigi merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan PADes mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 peningkat 100% lebih 2,380,014,655 tahun 2019 menjadi 9,590,701,000,00 di tahun 2021, sedangkan ada peningkatan dari aspek gerak umkm salah satunya keterlibatan warga umkm yang senantiasa berjualan diarea wisata, serta mempekerjakan warga sekitar di wisata Setigi.

Dari data tabel diatas menunjukkan angka kenaikan APBdes yang luar biasa dengan adanya keberadaan wisata SETIGI yang digagas oleh pemerintah desa dan dikelolah oleh BUMDES dengan melibatkan semua unsur masyarakat, agar dari hulu hilir semua ada masukan dan nantinya bisa menggerakan ekonomi masyarakat yang optimal, seperti yang terjadi sekarang keberadaan SETIGI berdampak pada peningkatan ekonomi desa diantaranya UMKM desa yang meningkat dikelolah oleh ibu-ibu dan mekanisme kupon, bagian dari membantu warga masyarakat desa Sekapuk, dalam mekanisme mengembangkan desa yang digagas oleh kepala desa dan dibantu oleh semua warga Sekapuk.

Keberhasilan Desa Sekapuk tidak lepas dari peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDES dan juga masyarakat. Partisipasi dalam pengelolaan obyek wisata diantaranya sebagai pemandu wisata, penyedia jasa penyeberangan menggunakan perahu, dan juga mendirikan warung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Gresik dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dilihat dari tingkat pendapatan

rata-rata penduduk Desa Sekapuk sebelum adanya Wisata Sekapuk adalah Rp. 1.800.000,-/bulan. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Sekapuk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industry, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Sekapuk, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 1.680 orang. Selain adanya peningkatan pendapatan masyarakat tetapi Wisata SETIGI diketahui juga adanya peningkatakan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Terkait pengelolaan pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata Setigi di desa Sekapuk ini tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternative pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata menurut (Edwin, 2015) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Dari kesimpulan hasil penelitian, sejalan dengan pendapat Spillane dalam (Murdiastuti, Hermanto Rohman, 2014) menyatakan bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi, yaitu yang pertama segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), kedua segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan ketiga segi kebudayaan (memperkenalkan budaya kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Senada dengan hal itu, Herbison dan Myers (dalam (Panpan Achmad Fadjri, 2000) mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Pada dasarnya, kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu pembangunan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang maka kemampuan serta keterampilan yang dimiliki pun semakin tinggi.

Maka dari hasil penelitian dan fenomena di atas menunjukan keberhasilan wisata SETIGI dalam meningatkan pendapatan asli daerah dan dapat mendatangkan sumber ekonomi baru selain menjadi buruh tani. Selain itu, banyaknya kunjungan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda, hal tersebut berdampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar sehingga banyaknya permintaan wisatawan

terhadap barang dan jasa penunjang wisata yang dapat mendorong suatu wilayah untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang secara langsung ditimbulkan oleh adanya aktivitas wisata.

Kesimpulan

Peranan wisata Setigi (selo tirto giri) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terlihat dari melibatkannya masyarakat dalam kegiatan yang ada di wisata SETIGI. Untuk pengelolaannya wisata SETIGI memperkerjakan masyarakat sekitar dengan syarat wajibnya KK dan KTP Desa Sekapuk. Hal ini bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Sekapuk dan juga meningkatkan perekonomiannya. Selain itu keberadaan wisata SETIGI juga merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan PADes mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 peningkat 100% lebih 2,380,014,655 tahun 2019 menjadi 9,590,701,000,00 di tahun 2021, sedangkan ada peningkatan dari aspek gerak UMKM salah satunya keterlibatan warga UMKM yang senantiasa berjualan diarea wisata, serta mempekerjakan warga sekitar di wisata Setigi.

Belum tersedianya sarana seperti wisatawan pondok tempat berteduh, toilet yang memadai karena belum ada pengelolaan dari pihak pemerintah desa maupun Dinas Pariwisata sehingga tidak ada sarana fisik yang dibangun di sekitar lokasi wisata. Prasaranan ini sangat dibutuhkan oleh para wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata. Belum optimalnya jalan raya wisata menuju sebuah Objek wisata Setigi seperti kecilnya bahu jalan raya dan adanya lubang-lubang sehingga pengunjung harus berhati-hati menuju lokasi wisata, Belum termanfaatnya infrastruktur yang sudah tersedia secara maksimal oleh pengelolah wisata, belum maksimalnya sosialisasi pengetahuan tentang manfaat pariwisata yang ditandai dengan ijin penataan dari pemilik tanah yang sampai saat ini belum diberikan kepada Pemdes maupun Dispar. Namun Sikap ramah tamah masyarakat setempat sudah ditunjukkan melalui kenyamanan yang ditunjukkan kepada pengunjung secara tidak langsung dengan tidak mengganggu aktifitas wisata mereka sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman ketika berwisata di SETIGI, Belum berhasilnya koordinasi yang dibangun pemerintah tingkat desa dan kecamatan dengan pemilik tanah sehingga belum bisa dikelola dengan maksimal. Belum maksimalnya ijin penataan dari pemilik tanah membuat desa wisata SETIGI belum bisa ditatakembangkan dan berdampak pada larinya investor dari wisata SETIGI.

Daftar Pustaka

Amerta, I. M. S. (2019) *Pengembangan Pariwisata Alternatif,*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Asmoro, A. Y. and Aziz, M. (2020) 'Potensi Pengembangan Setigi sebagai Destinasi Wisata', *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 5(3), p. 228. doi: 10.32503/jmk.v5i3.1136.

Creswell, J. . (2013) *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edwin, G. (2015) 'Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Selatan Hilir Kabupaten Malinau', *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3(1), pp. 152–163.

Gurney, G. G. et al. (2016) '"Participation in Devolved Commons Management: Multiscale Socioeconomic Factors Related to Individuals' Participation in Community-Based Management of Marine Protected Areas in Indonesia."', *Environmental Science and Policy*, 61, pp. 212–220.

Gustina, R. D. and Mussadun, M. (2018) 'Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan', *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), p. 144. doi: 10.14710/jpk.6.2.144-154.

Hamidah (2016) '"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik)."', pp. 51–58.

Huraerah. (2008) *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung.

Jannah, U. (2019) *"Strategi Bauran Komunikasi Pemasaran Obyek Wisata Baru (Studi Deskriptif Wisata Bukit Kapur Setigi Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)."*

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB (17787BC).

Moleong, L. J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Murdiastuti, Hermanto Rohman, S. (2014) *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Surabaya: Pustaka Radja.

Panpan Achmad Fadjri (2000) *Analisis kualitas sumber daya manusia menurut kota di Indonesia*. Warta Demografi.

Pflughoeft, Benjamin R., and I. E. S. (2020) '"Social Media as E-Participation: Can a Multiple Hierarchy Stratification Perspective Predict Public Interest?"', *Government Information Quarterly*, 37.

Tumbel, S. M. (2018) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.', *Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014). Indonesia.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Indonesia.

© 2022 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.